

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Di mana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Wati et al, 2014).

Adanya otonomi daerah menuntut secara tidak langsung pemerintah daerah untuk menyajikan Laporan Keuangan Secara transparan dan tepat. Pemerintah daerah diwajibkan bertanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat dalam penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah. Instansi Pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah di ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut di perlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah

satunya adalah informasi akuntansi yang berupa Laporan Keuangan (Mardiasmo,2009).

Pemahaman Akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengintrepretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. (Lembaran Negara RI,2005)

Laporan keuangan merupakan suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Di mana laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Wati et al, 2014).

Laporan keuangan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas suatu entitas serta media informasi akuntansi untuk bisa menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lain. Menurut PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Informasi dalam laporan keuangan

pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kriteria dalam akuntansi pemerintahan yaitu relevan (*relevance*), andal (*reability*), dapat dipahami (*understandability*) dan dapat di bandingkan (*comparability*). (Mokoginta et al,2017)

Menurut Wati et al (2014) Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi.sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan.

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Nurillah: 2014).

Menurut Nasaruddin (2008, 2) Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. (Lembaran Negara RI,2005)

Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman pada standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Di mana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. (Lembaran Negara RI,2010)

Dalam suatu penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi keuangan yang sudah berjalan dan digunakan dan digunakan oleh seluruh pihak. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisarkan sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan 2010, 201).

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

*The application of accounting information system and the competence of human resources have to be increase in order to improve the quality of financial reporting in Lebak Banten Indonesia oleh Yusar Sagara (2015).*

*Based on the Government Accounting Standards (SAP), stated that "Regional Financial Accounting System (SAKD) is aiming to increase the accountability and reliability of government or financial manager through the preparation and development of government accounting standards. Iskandar Muda, et all (2017).*

*Based on the results of the analysis and discussion it can be concluded that human resources positive influence on the quality of local government financial statements Batam, which means the more competent human resources the better quality of financial reports produced. Likewise with the regional financial accounting system positive influence on the quality of local government financial statements Batam, which means the better local financial accounting*

*system applied, the better also the quality of regional financial reports generated.*

Cynthia (2017)

*From the definition above it can be concluded that competence is a character or motive both individual and organizations to achieve superior job performance. Therefore the competence of government accountants are competencies possessed by government accountants in this case relates to the processing of governmental financial reporting. Kasim(2015)*

Penelitian ini mengkombinasikan variabel-variabel bebas penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ropiyantie (2012) dan Junnaini (2012). Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ropiyantie (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya)“. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penambahan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan letak lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Junnaini (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja (survei pada Dinas Kota Bandung)”. Penelitian ini menambahkan variabel kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen serta menguji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Dalam ekonomi Islam laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban yang didasarkan pada empat hal, yaitu : Pertama, prinsip tauhid, yaitu dimana kita meyakini akan kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah SWT didalam mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme perolehan rizki. Sehingga seluruh aktivitas, termasuk ekonomi, harus dilaksanakan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah SWT secara total. Yang kedua, prinsip keadilan dan keseimbangan, yang menjadi dasar kesejahteraan manusia. Karena itu, setiap kegiatan ekonomi haruslah senantiasa berada dalam koridor keadilan dan keseimbangan. Kemudian Yang ketiga adalah kebebasan. hal ini berarti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya. Selanjutnya yang keempat adalah pertanggungjawaban. Artinya bahwa manusia harus memikul seluruh tanggung jawab atas segala keputusan yang telah diambilnya. Jenis laporan keuangan ini begitu penting bagi pihak pengguna dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan tersebut. (Windari , 2016)

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul : **“PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TINJAUAN DALAM SUDUT PANDANG ISLAM (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bekasi Periode 2019).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- b. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- c. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- d. Bagaimana Pemahaman Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditinjau dari sudut pandang Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari masalah-masalah yang dirumuskan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- d. Untuk mengetahui bagaimana Pemahaman Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditinjau dari sudut pandang Islam.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas YARSI.

- b. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai informasi atau bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi sebagai variabel dependennya.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk dijadikan masukan dan pertimbangan guna meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.